

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Setiap perusahaan harus mampu menghasilkan laporan keuangan yang tidak hanya mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, tetapi juga memenuhi karakteristik kualitatif informasi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2016). Persyaratan tersebut meliputi relevansi, representasi yang tepat, kemudahan untuk dibandingkan, dapat diverifikasi, disajikan tepat waktu, dan mudah dipahami. Laporan keuangan yang memenuhi kriteria ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, seperti investor, kreditur, dan masyarakat umum.

Namun, pada kenyataannya, banyak perusahaan yang melanggar prinsip-prinsip tersebut dengan memanipulasi laporan keuangan. Praktik ini termasuk dalam tindakan *fraud*, yaitu segala bentuk kecurangan, penyembunyian, atau penyalahgunaan kepercayaan yang mencakup *fraudulent financial statement*, *misappropriation of assets*, dan *corruption*, yang dapat menimbulkan risiko keuangan bagi suatu lembaga (Rahmatika, 2020). *Fraud* bukanlah istilah yang asing di telinga masyarakat, mengingat dampak buruk yang ditimbulkannya terhadap berbagai pihak. Salah satu kasus *fraud* terbesar dalam sejarah Amerika Serikat adalah skandal Enron Corporation yang terjadi pada tahun 2001. Perusahaan energi raksasa ini melakukan manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan masa depan yang belum terealisasi serta menyembunyikan utang dan kerugian melalui anak perusahaan (Bondarenko, 2024). Kasus *fraud* lainnya terjadi di WorldCom pada tahun 2002, di mana perusahaan ini membengakkan pendapatan bersih dengan cara mencatat pengeluaran operasional sebagai investasi, sehingga menciptakan laba bersih yang seharusnya tidak ada (Hayes, 2024).

Kecurangan laporan keuangan bukanlah hal yang lumrah terjadi. Riset Dyck et al. (2024) mengungkap bahwa sebanyak 41% dari perusahaan publik besar dilaporkan melakukan kesalahan penyajian laporan keuangan secara material.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Beasley et al. (2010) menunjukkan bahwa perusahaan publik Amerika Serikat mengalami peningkatan signifikan dalam kasus *fraud* laporan keuangan. Dari tahun 1998 hingga 2007, terdapat 347 kasus dugaan *fraud* laporan keuangan perusahaan publik, meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada 1987 hingga 1997 yang mencatat 294 kasus. Peningkatan ini berdampak pada melonjaknya nilai *fraud* laporan keuangan. Dalam satu dekade terakhir, total kesalahan penyajian atau penggelapan kumulatif dari 300 kasus yang datanya tersedia mencapai hampir \$120 miliar, dengan rata-rata kerugian sebesar \$400 juta per kasus.

Berdasarkan riset Occupational Fraud 2024: A Report To The Nations yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2024), kecurangan laporan keuangan merupakan jenis *fraud* yang jarang sekali terjadi, yakni hanya sebanyak 5% saja dari total *fraud*, tetapi kecurangan laporan keuangan justru menyebabkan kerugian terbesar, dengan rata-rata kerugian sebesar \$766.000 per kasus. Dalam riset tersebut, diungkapkan pula bahwa hanya 1% kasus yang melibatkan kecurangan laporan keuangan sebagai satu-satunya jenis kecurangan. Sebaliknya, dalam sebagian besar kasus, kecurangan laporan keuangan biasanya terjadi bersamaan dengan jenis kecurangan lain, seperti korupsi ataupun penyalahgunaan aset. Di samping itu, kecurangan laporan keuangan juga menyebabkan kerugian yang cenderung cepat dibandingkan jenis *fraud* lainnya. Riset tersebut menyebutkan bahwa kecurangan laporan keuangan menyebabkan kerugian yang lebih besar dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan jenis kecurangan lainnya, yakni sebesar \$42.600 per bulan. Hal ini disebabkan karena kecurangan laporan keuangan sering kali melibatkan manipulasi jumlah besar yang memengaruhi banyak aspek bisnis dan pemangku kepentingan secara langsung.

Riset tersebut terbukti relevan dengan kondisi nyata. Hal ini diperkuat oleh banyaknya kasus *fraud* di Indonesia, terutama yang melibatkan perusahaan publik atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu contohnya adalah kasus Indofarma. Berdasarkan media informasi BPK RI (2024), ditemukan indikasi manipulasi laporan keuangan periode 2020-2023 yang berpotensi merugikan

negara hingga Rp371,8 miliar. Kasus serupa juga terjadi pada PT Kimia Farma Tbk. Menurut Affan (2024) dalam Bloomberg Technoz, perusahaan ini diduga memanipulasi laporan keuangan dengan menggelembungkan angka agar terlihat menguntungkan, padahal seharusnya mengalami kerugian (*mark-up*). Selain itu, Garuda Indonesia juga pernah terlibat dalam kasus serupa. Hartomo (2019) dalam media Okezone melaporkan bahwa maskapai ini mencatatkan laba bersih sebesar Rp 11,33 miliar dengan memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi, meskipun perusahaan tersebut masih memiliki utang kepada Garuda Indonesia. Selain ketiga kasus tersebut, masih banyak kasus korupsi lain di BUMN yang saat ini masih dalam proses penyelidikan.

Menurut riset ACFE (2019), BUMN menempati posisi kedua sebagai lembaga yang paling banyak mengalami kerugian akibat *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa selain merugikan perusahaan BUMN secara langsung, *fraud* juga berdampak besar pada keuangan negara. Lebih lanjut, dalam media berita Kompas, Shaid (2024) menjelaskan bahwa pada tahun 2025, pemerintah menargetkan setoran dividen dari BUMN ke kas negara mencapai Rp 90 triliun. Target yang tinggi ini dapat memberikan tekanan besar terhadap arus kas perusahaan BUMN, yang berpotensi mendorong praktik tidak etis, seperti manipulasi laporan keuangan atau bentuk *fraud* lainnya, demi memenuhi target tersebut. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini tidak hanya akan merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMN sebagai agen pembangunan ekonomi nasional.

Terjadinya *fraud* berkaitan dengan *Agency Theory*, yang menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen perusahaan (agen) dan pemegang saham atau pemerintah sebagai pemilik perusahaan (prinsipal). Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa manajemen memiliki kepentingan untuk menjaga reputasi dan mempertahankan posisinya, sedangkan prinsipal menginginkan keuntungan yang tinggi. Dalam situasi ini, tekanan yang berlebihan dapat mendorong manajemen untuk mengambil tindakan oportunistis, seperti manipulasi laporan keuangan, untuk memenuhi ekspektasi para prinsipal. Jika mekanisme

pengawasan dan tata kelola perusahaan tidak dijalankan dengan baik, maka asimetri informasi, di mana manajemen memiliki lebih banyak informasi dibandingkan prinsipal akan semakin meningkat, sehingga memperbesar potensi terjadinya *fraud*.

Di samping itu, *Stakeholder Theory* (Freeman et al., 2002) memperluas sudut pandang tersebut dengan menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengelola hubungan dengan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap operasionalnya, termasuk pemegang saham, karyawan, pemasok, pelanggan, kreditur, pemerintah, dan masyarakat. Perbedaan kepentingan di antara kelompok-kelompok ini dapat memunculkan tekanan bagi manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan demi menguntungkan satu pihak, sehingga menimbulkan ketidakadilan informasi dan potensi kerugian bagi pihak lainnya.

Untuk mendeteksi penyebab terjadinya *fraud*, berbagai penelitian telah mengidentifikasi sejumlah faktor pemicu kecurangan. Teori *fraud* terbaru diperkenalkan oleh Vouzinas (2019) yang dikenal dengan *Fraud Hexagon Theory*, yang menyatakan bahwa kecurangan dipengaruhi oleh enam faktor, yaitu stimulus, kapabilitas, kolusi, kesempatan, rasionalisasi, dan ego.

Cressey (1950) dalam Arifin (2020) menjelaskan bahwa stimulus yang dialami seseorang untuk melakukan kecurangan dapat timbul akibat kebutuhan keuangan yang mendesak atau faktor pekerjaan yang menyebabkan tekanan dalam melakukan tindakan *fraud*. Beberapa penelitian tentang kecurangan laporan keuangan telah menyoroti fenomena ini, seperti penelitian Achmad et al. (2022) pada perusahaan BUMN di Indonesia yang mengungkapkan bahwa dorongan untuk melakukan *fraud* salah satunya disebabkan oleh stabilitas keuangan perusahaan yang sedang terancam akibat kondisi ekonomi, industri, atau keadaan lainnya. Ketika suatu bisnis mengalami kesulitan dalam menjaga stabilitas keuangan akibat kinerja usaha yang buruk, akan muncul tekanan kepada manajemen untuk melakukan manipulasi pada laporan keuangan. Sementara itu, penelitian Oktaviany & Reskino (2023) terhadap perusahaan perbankan dan keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) di Indonesia menunjukkan bahwa tekanan eksternal dapat mendorong individu untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Penelitian

Biduri & Tjahjadi (2024) pada perusahaan perbankan syariah di Indonesia juga mengungkap bahwa ketika perusahaan mendapatkan tekanan dari pihak ketiga untuk tetap kompetitif, manajemen cenderung melakukan manipulasi laporan keuangan untuk memenuhi ekspektasi pihak eksternal.

Komponen penyebab terjadinya *fraud* selanjutnya adalah *capability*. Komponen ini merupakan komponen penyebab *fraud* yang berasal dari penelitian Wolfe & Hermanson (2004) yang menciptakan *Fraud Diamond Theory*, yaitu sebuah perkembangan dari *Fraud Triangle Theory*. Apabila seseorang *capable* dalam melakukan *fraud* melalui ilmu pengetahuan ataupun informasi yang dimilikinya, maka hal tersebut akan mendukung terjadinya *fraud*. Penelitian Allie et al. (2024) terhadap 435 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, menunjukkan bahwa kapabilitas yang diukur menggunakan pergantian direksi berpengaruh positif terhadap terjadinya *fraud* dalam laporan keuangan. Penelitian Kautsar & Andhaniwati (2024) pada BUMN yang terdaftar di BEI mengartikan bahwa terdapat periode stress setelah pergantian direktur, yang dapat menyebabkan kinerja awal yang buruk dan membuat manajemen melakukan kecurangan laporan keuangan. Sementara itu, penelitian Nugroho & Diyanty (2022) pada perusahaan non-keuangan di Indonesia menunjukkan bahwa kapabilitas yang diukur menggunakan pendidikan CEO memiliki pengaruh positif atas kecurangan laporan keuangan. Probabilitas manajer untuk memanfaatkan manipulasi laporan keuangan akan meningkat ketika CEO memiliki kapabilitas tinggi dalam melakukan kecurangan. Hasil penelitian Haeronnisa & Isnawati (2024) di perusahaan asuransi dalam BEI juga menunjukkan hal yang sama, di mana pendidikan CEO menyebabkan meningkatnya kecurangan laporan keuangan.

Terjadinya *fraud* dalam *Fraud Hexagon Theory* juga disebabkan oleh adanya kolusi. Dalam penelitian Allie et al. (2024), koneksi politik yang diprosikan dengan kerja sama dalam proyek pemerintah berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hubungan kerja sama yang dibangun dengan koridor yang baik dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam memperoleh akses ke berbagai pinjaman, subsidi, atau layanan lain yang disediakan

oleh pemerintah. Namun, hubungan ini dapat mengarah pada *conflict of interest*, yang pada akhirnya dapat mendorong perusahaan untuk terus melakukan kecurangan. Hasil serupa juga dijelaskan dalam penelitian Arum et al. (2024) terhadap perusahaan non-keuangan di BEI yang menunjukkan bahwa kecurangan pelaporan keuangan disebabkan oleh kolusi, yang diukur berdasarkan koneksi politik. Koneksi politik dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan karena perusahaan dengan hubungan politik yang kuat sering kali memiliki akses lebih mudah terhadap sumber daya keuangan dan bantuan pemerintah.

Kesempatan juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan. Ketika seseorang menemukan kesempatan dalam melakukan *fraud*, maka *fraud* akan terjadi. Penelitian Allie et al. (2024) menunjukkan bahwa peluang yang diprosikan dengan pengawasan yang kurang efektif berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Pengawasan yang lemah memberikan kesempatan dan mendorong manajer untuk melakukan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ketidakefisienan sistem pengawasan dan pemantauan dapat dikurangi dengan keberadaan dewan komisaris independen. Semakin banyak komisaris independen, semakin efektif pengawasan dan semakin rendah kemungkinan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan (Khamainy et al., 2022). Sementara itu, penelitian Arum et al. (2024) menunjukkan bahwa kesempatan yang diukur menggunakan *nature of industry* berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* laporan keuangan. Manajer akan berfokus pada akun-akun tertentu, termasuk piutang tak tertagih dan persediaan usang, yang saldo akhirnya diestimasi oleh perusahaan. Estimasi probabilitas piutang tak tertagih memerlukan penilaian subjektif. Hal ini yang dapat menjadi celah dalam melakukan *fraud*.

Terjadinya *fraud* juga disebabkan karena adanya rasionalisasi, yaitu sikap atau pemberaran yang digunakan oleh anggota dewan, manajemen, atau karyawan ketika melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan (Fleming, 2021). Menurut penelitian Kautsar & Andhaniwati (2024), rasionalisasi yang diukur dengan pergantian auditor mungkin merupakan tanda bahwa badan usaha tersebut

sedang mencari auditor yang lebih berkualifikasi atau berusaha menyembunyikan kecurangan yang mungkin ditemukan oleh auditor sebelumnya. Sementara itu, menurut Skousen et al. (2009), insiden kegagalan audit dan litigasi cenderung meningkat segera setelah terjadi pergantian auditor. Dalam penelitian lain, seperti Penelitian Ahmadiana & Novita (2018) menunjukkan bahwa rasionalisasi yang diproksikan dengan rasio total akrual memberikan peluang bagi manajemen untuk melakukan *financial statement fraud*. Total akrual mudah dimanipulasi karena belum melibatkan arus kas secara langsung, sehingga dapat digunakan untuk menyesuaikan angka dalam laporan keuangan sesuai keinginan manajemen.

Penyebab terjadinya *fraud* juga melibatkan faktor arogansi. Arogansi, menurut Marks (2012) ditunjukkan oleh sikap superioritas atas sesuatu hal. Ketika seseorang memiliki rasa arogansi, maka dirinya akan merasa bahwa dirinya terbebas dari pengendalian internal, yang memungkinkan untuk melakukan *fraud*. Penelitian Kautsar & Andhaniwati (2022) serta Rahma & Sari (2023) menunjukkan bahwa frekuensi foto CEO dalam laporan tahunan mencerminkan tingkat arogansi atau ego CEO. Semakin banyak foto yang ditampilkan, semakin tinggi ego CEO, yang dapat mendorong dominasi berlebihan dalam perusahaan. Tingkat ego yang tinggi ini berpotensi meningkatkan risiko kecurangan laporan keuangan karena CEO cenderung mengendalikan sistem pengendalian internal dan merasa memiliki kewenangan penuh atas keputusan perusahaan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian Inayah & Chariri (2024) pada BUMN yang terdaftar di BEI menggunakan *CEO duality* sebagai ukuran arogansi dan menemukan bahwa hal ini berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. *CEO duality* dapat menimbulkan konflik kepentingan, memperbesar peluang penyalahgunaan wewenang, dan meningkatkan risiko kecurangan.

Meskipun begitu, beberapa penelitian justru mengungkapkan bahwa *Fraud Hexagon* belum cukup mampu dalam memprediksi determinan penyebab terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan. Nugroho & Diyanty (2022) yang meneliti entitas non-keuangan Indonesia mengungkapkan rasionalisasi dan kolusi tidak berpengaruh terhadap *financial statement fraud*. Hal ini disebabkan karena ketika

seorang manajer melakukan kecurangan, ia memahami risiko yang ada, sehingga individu tersebut tidak akan merasionalisasikan tindakannya. Di samping itu, ego yang rendah juga tetap akan menumbuhkan kecenderungan untuk bertindak curang pada saat pelaporan keuangan, apabila individu tersebut berada dalam tekanan. Penelitian Oktaviany & Reskino (2023) menunjukkan bahwa stimulus, kesempatan, rasionalisasi, kapabilitas, dan ego tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Stimulus yang diukur dengan peningkatan profitabilitas dapat terjadi akibat perbaikan kinerja operasional perusahaan, bukan karena dorongan untuk melakukan fraud. Kesempatan yang diproksikan dengan jumlah dewan komisaris juga tidak selalu menjamin efektivitas pengendalian internal dan tata kelola perusahaan. Sementara itu, rasionalisasi yang diukur melalui pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) lebih sering terjadi karena faktor reputasi auditor atau kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, bukan untuk menutupi kecurangan. Peraturan membatasi auditor yang sama hanya dapat mengaudit perusahaan selama tiga tahun berturut-turut atau maksimal enam tahun untuk satu KAP. Dalam penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh Riyanti dan Trisanti (2021), kapabilitas diukur melalui latar belakang pendidikan direktur utama (CEO) dirasa belum cukup untuk mengungkap terjadinya *fraud*, karena pada entitas besar yang telah menerapkan sistem informasi akuntansi yang komprehensif, pelaku kecurangan laporan keuangan tidak dapat melakukan *fraud* seorang diri. Hal ini menunjukkan bahwa kapabilitas tidak hanya ditentukan oleh individu semata, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan organisasi dan sistem pengendalian internal yang diterapkan. Adapun ego, yang diproksikan dengan frekuensi foto CEO dalam laporan tahunan, dapat mencerminkan gaya kepemimpinan yang tegas dan karismatik, bukan sekadar upaya untuk menonjolkan diri. Kepemimpinan yang kuat justru dapat meningkatkan kedisiplinan karyawan dan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan.

Kecurangan dalam laporan keuangan yang sering terjadi perlu mendapat perhatian serius. Untuk mengurangi kecenderungan terjadinya kecurangan tersebut, diperlukan mekanisme pengendalian yang efektif. Sarbanes-Oxley Act (SOA),

yang merupakan peraturan atas tanggapan dari terjadinya beberapa skandal *fraud* pada tahun 2002, mengungkap bahwa membangun tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Di Indonesia, seiring dengan meningkatnya kasus *fraud* di lingkungan perusahaan, terutama pada BUMN, peran organ perusahaan seperti dewan direksi, komite audit, tim manajemen puncak, auditor internal, dan auditor eksternal menjadi perhatian. Hal ini disebabkan oleh tanggung jawab mereka dalam mendeteksi serta mencegah terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik atau disebut dengan *Good Corporate Governance* (GCG).

Pada beberapa penelitian, GCG terbukti dapat memoderasi dengan melemahkan pengaruh komponen *fraud hexagon* terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian Arum et al. (2024) menunjukkan bahwa GCG, yang diukur menggunakan persentase komisaris independen dapat memoderasi pengaruh *fraud hexagon* terhadap *financial statement fraud*. Sementara itu, dalam penelitian Allie et al. (2024), GCG yang diukur menggunakan jumlah anggota komite audit memiliki peran penting dalam memoderasi pengaruh berbagai faktor terhadap kecurangan laporan keuangan. Komite audit diketahui melemahkan pengaruh *pressure, rationalization, capability, arogance*, dan *collusion* terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian Riyanti & Trisanti (2021) menunjukkan bahwa komite audit yang diukur menggunakan persentase komite audit dengan keahlian keuangan mampu melemahkan pengaruh tekanan terhadap *financial statement fraud*, sedangkan penelitian Oktaviany & Reskino (2023) menunjukkan bahwa komite audit dengan ukuran yang sama mampu melemahkan pengaruh arogansi terhadap *financial statement fraud*. Penelitian Puteri & Reskino (2023) juga menunjukkan bahwa komite audit dengan ukuran yang sama mampu melemahkan kolusi terhadap *financial statement fraud*.

Berdasarkan permasalahan dan sejumlah penelitian terdahulu, terlihat bahwa *fraud hexagon* mampu memprediksi terjadinya *financial statement fraud* dan GCG mampu memoderasi pengaruh tersebut. Namun, dalam beberapa penelitian

terdahulu, masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, sehingga hal ini menarik untuk diuji kembali dan diteliti. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Fraud Hexagon* terhadap *Financial Statement Fraud* dengan *Good Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan BUMN di Indonesia)”.

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti merumuskan masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh stimulus terhadap *financial statement fraud*?
2. Bagaimana pengaruh kapabilitas terhadap *financial statement fraud*?
3. Bagaimana pengaruh kolusi terhadap *financial statement fraud*?
4. Bagaimana pengaruh kesempatan terhadap *financial statement fraud*?
5. Bagaimana pengaruh rasionalisasi terhadap *financial statement fraud*?
6. Bagaimana pengaruh ego terhadap *financial statement fraud*?
7. Bagaimana *good corporate governance* memoderasi pengaruh stimulus terhadap *financial statement fraud*?
8. Bagaimana *good corporate governance* memoderasi pengaruh kapabilitas terhadap *financial statement fraud*?
9. Bagaimana *good corporate governance* memoderasi pengaruh kolusi terhadap *financial statement fraud*?
10. Bagaimana *good corporate governance* memoderasi pengaruh kesempatan terhadap *financial statement fraud*?
11. Bagaimana *good corporate governance* memoderasi pengaruh rasionalisasi terhadap *financial statement fraud*?
12. Bagaimana *good corporate governance* memoderasi pengaruh ego terhadap *financial statement fraud*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut.

Nadira Luthfia, 2025

*PENGARUH FRAUD HEXAGON TERHADAP FINANCIAL STATEMENT FRAUD DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PERUSAHAAN BUMN DI INDONESIA)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Untuk mengetahui pengaruh stimulus terhadap *financial statement fraud*
2. Untuk mengetahui pengaruh kapabilitas terhadap *financial statement fraud*
3. Untuk mengetahui pengaruh kolusi terhadap *financial statement fraud*
4. Untuk mengetahui pengaruh kesempatan terhadap *financial statement fraud*
5. Untuk mengetahui pengaruh rasionalisasi terhadap *financial statement fraud*
6. Untuk mengetahui pengaruh ego terhadap *financial statement fraud*
7. Untuk mengetahui *good corporate governance* memoderasi pengaruh stimulus terhadap *financial statement fraud*
8. Untuk mengetahui *good corporate governance* memoderasi pengaruh kapabilitas terhadap *financial statement fraud*
9. Untuk mengetahui *good corporate governance* memoderasi pengaruh kolusi terhadap *financial statement fraud*
10. Untuk mengetahui *good corporate governance* memoderasi pengaruh kesempatan terhadap *financial statement fraud*
11. Untuk mengetahui *good corporate governance* memoderasi pengaruh rasionalisasi terhadap *financial statement fraud*
12. Untuk mengetahui *good corporate governance* memoderasi pengaruh ego terhadap *financial statement fraud*

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktik. Berikut penjelasan detailnya.

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dengan menggunakan konsep *Fraud Hexagon*, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman tentang variabel-variabel yang mendorong terjadinya kecurangan laporan keuangan. Secara khusus, penelitian ini dapat memperkaya literatur terkait pengaruh stimulus, kapabilitas, kolusi, kesempatan, rasionalisasi, dan ego terhadap *financial statement fraud*.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan mengenai peran *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai variabel moderasi dalam mengurangi risiko

Nadira Luthfia, 2025

**PENGARUH FRAUD HEXAGON TERHADAP FINANCIAL STATEMENT FRAUD DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PERUSAHAAN BUMN DI INDONESIA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

*fraud*. Temuan penelitian ini dapat memperkuat atau menguji kembali teori-teori sebelumnya, seperti *Agency Theory* dan *Stakeholder Theory*, yang dapat menyebabkan perilaku oportunistik, termasuk *fraud*.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam kepada manajemen BUMN mengenai faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko *financial statement fraud* dan menyediakan informasi mengenai pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk menekan peluang terjadinya *fraud* sehingga perusahaan dapat merancang strategi mitigasi yang lebih efektif.
2. Bagi regulator dan pemerintah, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merancang kebijakan atau regulasi yang lebih ketat terkait penerapan GCG dan pencegahan *fraud* di BUMN.
3. Bagi investor dan pemegang saham, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai faktor risiko yang dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga investor dan pemegang saham dapat mengambil keputusan investasi yang lebih bijak.

#### 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya menganalisis *financial statement fraud* berdasarkan rumus Beneish M Score dari Beneish (1997), yang dilakukan pada BUMN non-perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam rentang waktu tahun 2021 – 2023.